

BAB III

HUBUNGAN ASIMETRI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

ANTARA INDITEX DAN BANGLADESH

Liberalisasi ekonomi membawa perubahan besar dalam struktur hubungan ekonomi dan politik antar negara. Dapat dikatakan bahwa liberalisasi ekonomi membawa istilah baru mengenai “Dunia Tanpa Batas” dengan gejala utamanya adalah semakin kuatnya ketergantungan antara negara maju dan berkembang. Bagi negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah, liberalisasi ekonomi menjadi jalan untuk menarik negara maju guna menaikkan pertumbuhan ekonomi negara mereka. Dan motif ekonomi dianggap lebih mendominasi hegemoni negara maju terhadap negara berkembang. Negara berkembang akan selalu terkunci dalam sistem kapitalisme global dan membuat mereka sulit mengejar pembangunan ekonomi yang independen. Kapitalisme juga menciptakan kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin, dan mengarahkan dunia yang lebih terpolarisasi. Kapitalisme yang dijalankan perusahaan multinasional tidak membuat negara-negara semakin baik, justru akan memperlebar perbedaan antara negara kaya dan negara miskin. Dan akhirnya eksploitasi tenaga kerja hingga sumber daya terjadi pada negara berkembang akibat dampak dari sistem kapitalisme ini.

Bab ini akan menganalisis kondisi yang memungkinkan Inditex melakukan eksploitasi buruh garmen di Bangladesh menggunakan perspektif teori ketergantungan. Proses hubungan antara Bangladesh sebagai negara berkembang,

dan perusahaan multinasional Inditex selaku representatif dari negara maju, Spanyol, bersifat timpang dan penuh ketidakadilan. Inditex selaku perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja murah sedangkan sebagian besar keuntungan kembali lagi ke negara asal. Kondisi timpang ini akan terus dipertahankan agar keuntungan tetap dimiliki Inditex.

3.1. Kondisi Keterbelakangan di Bangladesh

Selama beberapa dekade belakang, dunia mulai berubah dengan cepat. Perubahan tersebut menyentuh hampir di setiap kehidupan, dan hal ini ditandai dengan integrasi, ketergantungan, dan kesalinghubungan antara negara-negara dunia. Kondisi ini yang dikenal dengan arus globalisasi yang secara bersamaan memunculkan kelompok neoliberal atau kelompok Kanan Baru di Amerika Serikat dan Eropa. Kelompok ini membawa pengaruh dengan mempengaruhi dan memberikan penekanan agar negara tidak ikut campur dalam urusan ekonomi. Kehadiran negara dalam sistem ekonomi liberal dianggap akan mempengaruhi keadaan pasar dan membuat berjalannya sistem ekonomi kurang efektif. Kondisi ini juga merubah sistem perdagangan dan investasi internasional dan memunculkan perusahaan multinasional (Rahmanto, 2012: 2-3). Liberalisme ekonomi kemudian memunculkan persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan, disparitas, dan ketergantungan pada negara berkembang. Tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah sosial, budaya, hingga struktur politik. Negara berkembang yang mengalami persoalan ini akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya berujung pada penurunan produktifitas dan pendapatan. Persoalan ini semakin kompleks disaat ekspansi

ekonomi politik negara maju yang berkontribusi dalam proses terjadinya keterbelakangan negara berkembang. Atau dapat dikatakan terjadi proses keterbelakangan global yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi masyarakat miskin di negara berkembang. Namun pada satu sisi, negara maju justru menikmati kesejahteraan ekonomi dan kemajuan dengan kondisi hidup masyarakatnya di atas rata-rata (Sholeh, n.d.).

Dalam sudut pandang Marxisme, masyarakat miskin seperti di Bangladesh yang bekerja di pabrik-pabrik produksi dan menjadi buruh dikategorikan ke dalam kaum proletar. Pengkategorian yang digambarkan oleh Marxisme ini ditentukan berdasarkan kepemilikan material dalam sistem produksi. Para buruh mendapatkan upah kerja rendah bahkan seringkali terjadi pemotongan upah. Tindakan ini membuktikan bahwa cara kerja yang dilakukan untuk menjaga keuntungan kaum borjuis. Situasi eksploitatif yang terjadi di lingkungan pabrik fashion di Bangladesh merupakan bagian dari kerangka sistem kapitalis, yang mana dalam kapitalisme eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan obyektif. Kaum borjuis akan membayar buruh dengan harga murah dari hasil yang mereka hasilkan, kemudian kaum borjuis akan menghasilkan keuntungan untuk diri mereka sendiri (Imron & Sari, 2020: 89). Keuntungan yang didapatkan oleh kaum borjuis kemudian terakumulasi seiring berjalannya waktu sesuai dengan proses produksi yang dijalankan. Keinginan kaum borjuis yang ingin mengambil lebih banyak keuntungan bukanlah berasal dari sifat dasar mereka yang serakah dan tidak berbudi, tetapi hukum persaingan dalam sistem kapitalisme yang mewajibkan kaum

borjuis meningkatkan keuntungan secara terus-menerus dengan tujuan mempertahankan usahanya dari pesaingnya.

Kondisi ini kemudian memunculkan konsep pembagian kerja dalam skala internasional yang dalam prakteknya menimbulkan keterbelakangan dan ketergantungan negara miskin terhadap negara kaya. Pembagian ini terbagi atas kelompok pemegang modal (perusahaan multinasional) dan tenaga kerja (negara berkembang) yang memiliki ketergantungan dan rawan terjadi eksploitasi oleh pemegang modal. Perusahaan multinasional akan senantiasa mencari lokasi produksi di negara berkembang yang berguna untuk mencapai efisiensi dan keuntungan yang maksimal. Upah dan biaya operasi yang lebih rendah daripada di negara-negara industri maju menjadi minat tersendiri bagi perusahaan multinasional. Tidak jarang jika negara maju menjadikan perusahaan multinasional sebagai salah satu instrumen interaksi hubungan internasional untuk memperoleh kepentingannya. Namun terkadang peran dari perusahaan multinasional ini acapkali diasumsikan memiliki peranan yang lebih dari negara. Seperti halnya yang terjadi pada Inditex, perusahaan multinasional yang bergerak di sektor ritel memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Spanyol (Madeley terj. Jebadu, 2008: 10).

Sebagai perusahaan dengan manajemen rantai pasokan global, Inditex berusaha untuk mengendalikan fasilitas dan operasi bisnisnya di negara-negara lain. Ditambah penggunaan model kerja *fast fashion* mendorong Inditex merubah manajemen rantai pasokan global. Perluasan proses produksinya mencangkup ke wilayah Asia, dan salah satunya ada di Bangladesh. Kondisi Bangladesh sebagai negara kurang berkembang dan negara produsen garmen besar menjadikan

Bangladesh sebagai negara yang menguntungkan bagi Inditex. Namun, kemajuan dan keuntungan yang didapatkan oleh Inditex secara bersamaan justru menciptakan kemiskinan serta keterbelakangan di Bangladesh. Akibatnya Bangladesh terjebak dalam lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan. Sifat hirarki dalam hubungan antar negara menunjukkan tingkat kemampuan masing-masing negara yang berbeda-beda (Apriliani, 2016: 38).

Sifat keterbelakangan di Bangladesh sangat berkaitan dengan berkembangnya kapitalisme. Terjadinya pembentukan kelas antara negara maju (pemilik modal) dan negara berkembang (tenaga kerja) berdampak pada sistem kerja yang dijalankan. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak yang diterima oleh buruh garmen yang bekerja selama menjalankan model kerja *fast fashion*. Negara berkembang seperti Bangladesh pada umumnya memiliki jumlah buruh yang besar, kemampuan buruh yang memadai ditambah dengan upah yang rendah. Bagi Bangladesh, model kerja *fast fashion* menciptakan peluang yang besar bagi masyarakat pra sejahtera, namun pekerjaan ini tidak menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada. Justru terjadi pelanggaran hak kerja terhadap para buruh di atas sistem hukum yang lemah. Hubungan yang terjalin ini menghasilkan kerugian hingga menciptakan ketergantungan Bangladesh dengan Inditex (Rizky & Chotimah, 2020: 65).

Industri garmen di Bangladesh merupakan industri yang kapitalistik, dimana barang diproduksi untuk penggunaan jangka pendek. Bahkan ketika para buruh menghadapi risiko kelaparan atau kematian, produsen hanya memfokuskan diri kepada pencarian keuntungan. Karena itulah produsen berusaha untuk menekan

biaya produksi serendah mungkin. Dengan penekanan biaya tersebut, terdapat beberapa konsekuensi yang harus diterima Bangladesh, seperti mengorbankan standar etika, menggunakan praktek kerja yang tidak adil, dan upah rendah yang didapatkan buruh (The Guardian, 2009). Pada akhirnya, keuntungan sepenuhnya didapatkan oleh Inditex, namun bagi buruh dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya. Hubungan ekonomi yang tidak adil dengan Inditex menyebabkan ketergantungan dan keterbelakangan karena adanya keterlibatan pihak asing yang melakukan eksploitasi. Keterbelakangan yang dialami oleh Bangladesh tidak dapat dilepaskan dari pola hubungan dengan negara maju. Hubungan ini jauh dari prinsip kesetaraan, sehingga menempatkan Bangladesh sebagai pihak yang selalu dirugikan (Sholeh, n.d.).

Bagi Bangladesh, alasan dasar mengapa mereka masih bergantung pada Inditex karena adanya kemiskinan. Bangladesh bisa dikatakan berada dalam dilema, karena sepak terjang Inditex yang sarat akan ketidakadilan tapi disisi lain Bangladesh memerlukan bantuan modal asing dari Inditex untuk membantu perekonomian negara. Padahal jika dipahami dari pembangunan kawasan melalui sejarah ekonomi politik global yang muncul pada saat kolonialisme Eropa, penyebab kemiskinan negara-negara dunia ketiga, seperti Bangladesh, bukan dari masalah domestik mereka sendiri melainkan bersumber dari sistem ekonomi dunia yang pada dasarnya tidak adil (Viotti dan Kauppi dalam Rosyidin, 2020: 67). Bangladesh dulunya merupakan negara yang satu dengan India di bawah pemerintah Kolonial Inggris, hingga memisahkan diri menjadi bagian dari Negara Pakistan. Namun pada 1971, Bangladesh memutuskan memisahkan diri dengan

Pakistan yang juga pada saat itu bertepatan dengan meletusnya perang India-Pakistan (Nathaniel, 2020).

Selama Inggris melakukan kolonialisme, wilayah ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam bidang politik terjadi perubahan pada sistem pemerintahan model kolonial sedangkan dalam bidang ekonomi kawasan ini memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar dan hal ini menguntungkan bagi Kolonial Inggris. Keuntungan ini direspon dengan cepat oleh Inggris dengan membangun banyak sekali pabrik-pabrik industri untuk mengolah bahan-bahan mentah untuk dibuat produk siap pakai. Dari hasil produk tersebut Inggris mendapatkan hasil besar atas keuntungan yang didapat, namun sebaliknya penduduk pribumi hanya memperoleh sedikit dari keuntungan tersebut. Kolonialisme ini menciptakan power asymmetric atau perbedaan status pada Bangladesh dan perbedaan ini menghasilkan kemampuan yang berbeda juga (Suryaji, 2017: 25-26).

Kolonialisme secara fakta tidak ada lagi setelah Perang Dunia II, tetapi ini tidak menghapuskan ketergantungan. Sebaliknya, situasi pasca kolonialisme menekan negara berkembang melalui kapitalisme dan keuangan. Situasi pasca kolonialisasi yang terjadi di Bangladesh berpengaruh dalam kebijakan yang diskriminatif, terutama terhadap buruh perempuan. Di Bangladesh jumlah partisipasi buruh perempuan sangat tinggi. Tercatat pada **tabel 3.1.** bahwa Bangladesh adalah negara dengan jumlah buruh terbanyak di kawasan Asia Selatan. Dengan jumlah sebesar 4.2 juta buruh bekerja dalam sektor garmen pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama, partisipasi

perempuan dalam sektor RMG di Bangladesh merupakan yang paling tinggi, yakni 90% dari jumlah buruh di Bangladesh adalah perempuan. Selain karena adanya stereotipe budaya yang menjadikan buruh perempuan korban dari bias gender di masyarakat, posisi buruh perempuan sering mengalami kerugian disaat masuknya modal asing dari negara kaya yang membawa modernisasi dan restrukturisasi ekonomi. Modernisasi memunculkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, yang mana kebanyakan laki-laki adalah pengawas bahkan manajer dan perempuan adalah buruh RMG (Mahmood, 2020: 554).

Tabel 3.0.1. Buruh Wanita Industri Garmen di Kawasan Asia Selatan

Country	Number of Workers	% of Female
Bangladesh	4.2 million	90
Sri Lanka	31200	81
India	5.3 million	38
Nepal	52000	18
Pakistan	912000	15

Sumber: BGMEA (2015)

Dampaknya adalah perempuan harus berperan ganda dalam mengurus urusan rumah tangga dan mendapatkan penghasilan tambahan. Buruh perempuan seringkali tidak memiliki kontrak kerja, sehingga dapat diberhentikan kapan saja oleh pihak perusahaan. Kontrak hanya sebatas komitmen lisan dan jarang perusahaan menggunakan formulir kontrak dalam menjalin kerjasama. Buruh perempuan yang tidak berpendidikan dilihat sebagai sumber upah murah dan tenaga kerja yang terbuang. Upah yang didapat pun tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan, yang mana upah per jam buruh di Bangladesh adalah USD 0.25,

jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia yang memiliki biaya USD 0.34, Pakistan USD 0.34, Cina USD 0.48 dan India USD 0.57. Inilah awal dari kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Bangladesh (Khan dalam Islam & Ahmed, 2014: 66).

Kemiskinan dan keterbelakangan muncul akibat pengaruh ekonomi, politik, dan budaya dari negara maju yang masuk melalui perusahaan multinasional. Keterbelakangan ini merupakan proses dalam kerangka kerja sistem kapitalis global di mana Bangladesh telah mengalaminya. Mereka menjadi terbelakang sebagai produk samping pembangunan barat yang disengaja. Keterbelakangan adalah proses di mana kekuatan kapitalis meluas menundukkan dan memiskinkan negara berkembang. Bentuk masyarakat terdahulu di negara berkembang sejatinya hidup terbelakang secara individu, tetapi keterbelakangan negara dimulai saat datangnya kapitalisme global. Kapitalisme global dalam sekali proses menghasilkan pembangunan dan kekayaan bagi negara maju serta keterbelakangan dan kemiskinan bagi negara berkembang. Menurut Frank dalam Kasnawi dan Ramli (2015), keterbelakangan yang dialami oleh Bangladesh justru diakibatkan karena adanya interaksi dengan sistem kapitalis dunia yang masuk ke Bangladesh melalui sektor modern negara. Sektor modern merupakan kaki tangan kapitalis dunia yang mengeksploitasi daerah atau sektor yang sekarang menjadi terbelakang. Hubungan kerjasama dalam model bisnis *fast fashion* dianggap bukan solusi dalam perkembangan ekonomi Bangladesh. Interaksi dengan Inditex tidak memberikan manfaat bagi Bangladesh, namun sebaliknya Inditex membutuhkan Bangladesh

untuk mendapatkan keuntungan dan mengeksploitasi sumber daya yang mereka miliki (Jackson & Sorensen terj. Suryadipura & Suyatiman, 2014: 330).

3.2. Kondisi Ketergantungan yang Dipertahankan Inditex

Perusahaan multinasional yang berkembang seiring liberalisasi ekonomi kian diterima oleh negara-negara dunia, dan mempunyai kontribusi dalam struktur ekonomi internasional. Mereka berperan dalam mengambil kebijakan ekonomi di negara-negara maju dan merupakan pemain sentral dalam membangun dan memelihara hubungan ketergantungan. Menurut Viotti dan Kauppi (2012), perusahaan multinasional adalah agen penting yang mewakili negara-negara maju untuk mempertahankan superioritas mereka dari negara berkembang. Dengan ini perusahaan multinasional mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang menempati proses produksi. Adanya perdagangan internasional dan investasi asing seringkali dianggap sebagai sumber utama transfer teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dengan kata lain, perdagangan internasional dan investasi asing dianggap sebagai sumber transfer pengetahuan, kinerja, dan teknologi, terutama dari negara industri ke negara sedang berkembang. Dan pada umumnya perusahaan multinasional memiliki markas utama di negara asal mereka yang kemudian membangun dan membeli aset usaha atau membuka cabang di negara tertentu. Pada kasus Inditex, mereka memiliki kantor pusat yang terletak di La Coruna, Spanyol (Masoed, 1997: 4-5).

Perusahaan multinasional dari dulu sudah memiliki peran penting dalam penentu pengaturan arus perdagangan, lokasi industri, dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Terbukti Inditex mampu menjalankan arus perdagangan fashion global serta mampu memasarkan produknya ke pasar-pasar di seluruh dunia. Begitu juga dengan lokasi industri, Inditex secara tidak langsung mengubah lanskap orientasi preferensi negara-negara di dunia. Kehadiran Inditex dengan model kerja *fast fashion*-nya mampu menjalankan proses produksi diluar negara tempatnya beroperasi, dan banyak membuka kesempatan untuk negara-negara lain ikut mengembangkan perekonomiannya dengan menjadi negara produsen yang berorientasi ekspor. Mekanisme ini dipastikan memberikan dampak kepada keadaan domestik suatu negara, seperti kesejahteraan ekonomi dan sosial di tempatnya. Segala aliran modal, baik dalam bentuk teknologi maupun uang akan berpengaruh besar bagi perkembangan negara yang ditanamkan investasi atau kerja sama saling membutuhkan antara perusahaan multinasional dengan negara yang bersangkutan (Ma'sumah, 2020: 43-44).

Kehadiran perusahaan multinasional kemudian merubah cara berkembang Bangladesh, kemiskinan yang dialami masyarakat Bangladesh menghambat perkembangan negara dan hal ini mendorong Pemerintah Bangladesh berpihak terhadap investasi asing. Sehingga pada 1980-an yang bertepatan dengan kepemimpinan Presiden Ziaur Rahman, Bangladesh menerapkan sistem *Open Door Policy* untuk menarik investasi asing sebanyak mungkin (Sitanggang, 2017). Bangladesh yang merupakan negara dengan produsen garmen terbesar kedua dunia menjadikan perusahaan fashion internasional, Inditex, tempat berbisnis dan

menanamkan modal di Bangladesh. Keterbatasan terhadap akses produksi terhadap sumber daya alam menjadikan Bangladesh membutuhkan negara lain untuk membantu program-program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ma'sumah & Kuswardhana, 2020: 1). Dengan adanya keterbukaan terhadap investor asing, Bangladesh mampu melakukan kerjasama guna memenuhi program pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu programnya adalah *five years plan* yang salah satu programnya mengenai peningkatan ekonomi secara cepat serta penyerapan tenaga kerja yang membutuhkan produktivitas tinggi (Apriliani, 2016: 44).

Inditex dapat membaca situasi yang ada di Bangladesh sehingga memutuskan untuk mengekspansi pasar Bangladesh dalam industri *fast fashion*. Aktivitas perluasan proses produksi yang dilakukan oleh Inditex secara berkelanjutan didasari oleh peluang-peluang yang dinilai oleh Inditex dapat menjadi tolak ukur merek dagang mereka untuk berkembang di negara tersebut dan Inditex melihat bahwa peluang perusahaan untuk berekspansi di Bangladesh sangat menjanjikan. Kepentingan ekspansi Inditex ini sangat berkaitan dengan sifat kapitalisme, yang mana dalam perspektif Marxisme, kepentingan nasional sebetulnya adalah kepentingan kapitalis. Kepentingan nasional tidak didefinisikan sebagai tujuan yang ingin diraih negara melainkan merujuk pada kepentingan kaum kapitalis. Karena kapitalis hanya memikirkan bagaimana menumpuk kekayaan, maka kepentingan negara adalah memastikan bagaimana upaya akumulasi keuntungan itu dapat terlaksana (Rosyidin, 2020: 66).

Bagi Inditex, Bangladesh memiliki *bargaining position* yang cukup menjanjikan. Dasar seperti inilah yang menjadikan perusahaan seperti Inditex akan mengabaikan batas-batas negara dalam operasinya, dan menciptakan saluran pemasaran global dan regional yang didirikan untuk tujuan ekspansi pasar. Terdapat juga dorongan biaya dimana setiap perusahaan yang telah beroperasi secara global sudah tidak lagi mempertimbangkan faktor geografis dalam bisnis mereka, sehingga mereka lebih tertarik untuk mencari faktor-faktor produksi yang memberikan ongkos yang paling murah. *Offshore outsourcing* adalah salah satu strategi yang dilakukan Inditex dalam ekspansi pasar dengan melakukan kontrol dalam sejumlah pembelian saham perusahaan atau dialihkan ke perusahaan lain. *Offshore outsourcing* sangat penting perannya dalam *global supply chain* tetapi relatif tidak dikenal karena sifatnya yang informal. Tuntutan akan waktu produksi yang cepat dalam model kerja *fast fashion* memungkinkan peran sub-kontraktor sangat dibutuhkan oleh Inditex. Produk dibuat dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan setelah itu akan dijual dibawah nama Inditex. *Offshore outsourcing* akan akan menekan upah buruh karena pada umumnya *offshore outsourcing* merupakan perusahaan-perusahaan kecil di mana upah yang relatif kecil diterapkan. Penguasaan atas sumberdaya yang murah memungkinkan perusahaan tersebut untuk bersaing dalam persaingan global (Madeley terj. Jebadu, 2008: 147)

Industri RMG di Bangladesh memunculkan persaingan antara supplier untuk mendapatkan pesanan dari Inditex. Para sub-kontraktor akan saling berebut satu sama lain untuk mendapatkan penawaran dari merek besar. Persaingan ini membuat harga barang bisa saja menurun, karena penawaran dengan harga terbaik

akan dipilih oleh Inditex. Dalam sub-kontraktor kuantitas mengalahkan kualitas, hal ini berkaitan dengan tenggat waktu pesanan yang selalu diberikan terhadap *offshore outsourcing*. Sehingga *offshore outsourcing* tidak dapat merencanakan beban kerja di pabrik secara tetap. Dampaknya adalah buruh sering harus melakukan kerja lembur hingga harus bermalam di pabrik untuk mengejar batas waktu yang ditentukan (Apu, 2013).

Pola produksi yang diterapkan negara maju adalah dengan penguasaan teknologi. Oleh karena itu Inditex berusaha memindahkan proses manufakturnya ke Bangladesh. Pemindahan lokasi produksi yang dijalankan Inditex di Bangladesh sejatinya menolong negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi situasi ini justru memberi keuntungan kepada Inditex dikarenakan situasi Bangladesh yang memiliki jumlah buruh yang banyak dan upah yang rendah. Tercatat pada tahun 2019, bahwa upah minimum bulanan di Bangladesh yakni sebesar USD 63, walaupun dalam hal ini sedikit lebih tinggi dari Sri Lanka yang sebesar USD 55. Realitas yang penuh dilema menimpa Bangladesh, karena mereka membutuhkan lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah pengangguran (Davis & Lu, 2020).

Disisi lain dalam proses produksi yang dijalankan di Bangladesh terdapat adanya prosedur yang tidak memenuhi standar dalam pembuatan fashion seperti, buruh bekerja berjam-jam, dalam kondisi yang tidak nyaman dan seringkali berbahaya sehingga mempengaruhi produktivitas dan efisiensi buruh garmen. Akibatnya kondisi yang tidak layak dapat dikategorikan sebagai perbudakan modern. Buruh tidak senang dengan upah mereka dan lingkungan kerja pabrik. Isu

kerusuhan buruh tidak hanya berkaitan dengan upah pekerja tetapi juga terkait dengan masalah non-upah lainnya seperti, kurangnya waktu luang, kerja lembur yang tinggi, dan hari libur, hingga perlakuan kasar pemilik pabrik kepada buruh (Ahmed et.al, 2013: 69-70). Jam kerja panjang tersebut berdampak juga pada keadaan kesehatan buruh yang kerap mengalami pingsan dan pusing. Dalam UU Ketenagakerjaan Bangladesh tahun 2006, waktu kerja buruh dalam per minggu adalah 48 jam atau jika ada waktu lembur bisa mencapai 60 jam. Namun dalam praktek lapangan, buruh justru dipaksa bekerja 72 jam per minggu (Berik & Rodgers, 2008: 19).

Pada akhirnya hasil produksi dan keuntungan Inditex akan kembali lagi ke negara maju seperti Amerika Utara dan Eropa. Produksi fashion yang telah selesai dibuat, dijual murah kepada konsumen kaya di Eropa dan Amerika Utara. Selain itu negara-negara ini dikenal sebagai negara yang banyak memunculkan *luxury brand* yang dimiliki oleh retailer dan tidak sedikit diantaranya yang mengusung *fast fashion*. Pada **tabel 3.2.** tercatat bahwa negara-negara Eropa dan Amerika Serikat merupakan pengimpor tertinggi hasil RMG dari Bangladesh selama tiga tahun terakhir. Walaupun pada tahun fiskal 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, Eropa dan Amerika Serikat masih menempati peringkat pertama dan kedua. Penjualan RMG ke negara-negara maju secara tidak langsung juga mempengaruhi pendapatan ekspor dari Bangladesh sendiri. Pendapatan ekspor Bangladesh pada akhir tahun fiskal 2019-2020 turun 14,57% menjadi USD 33,67 miliar dari yang sebelumnya USD 40,54 miliar. Pendapatan ekspor pada paruh kedua (Juli-Desember) tahun 2020 hampir kembali ke jalurnya tetapi gelombang

kedua wabah di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyebabkan kesengsaraan pada sektor ekspor. Diketahui bahwa ekspor RMG tahun 2020 turun 16,94% menjadi USD 28 miliar dari USD 34,13 miliar 2019 (Islam, 2021). Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks global, jumlah ekspor fashion juga dipengaruhi struktur pasar, karena pada masa pandemi, orang-orang memprioritaskan diri pada keselamatan dan ketahanan ekonomi. Hal ini berpengaruh pada pembelian dan permintaan terhadap fashion. Kuantitas produksi perusahaan menurun dan membatalkan pesanan impor di negara-negara maju. Akibatnya puluhan buruh yang bekerja di pabrik produksi mengalami pemecatan (Hossain, 2020).

Tabel 3.0.2. Ekspor Pakaian Jadi Bangladesh (FY18-19, FY19-20, FY20-21)

Country	Total RMG in USD		
	2018-19	2019-20	2020-21
EU	21133.08	17146.18	19430.53
USA	6133.72	5146.53	5946.40
Non-Traditional Market ¹	5687.17	4780.20	5084.21
Canada	1179.30	876.27	995.59
Total Export of RMG	34133.27	27949.19	33674.09
Export Earning of Bangladesh	40535.04	33674.09	38758.31

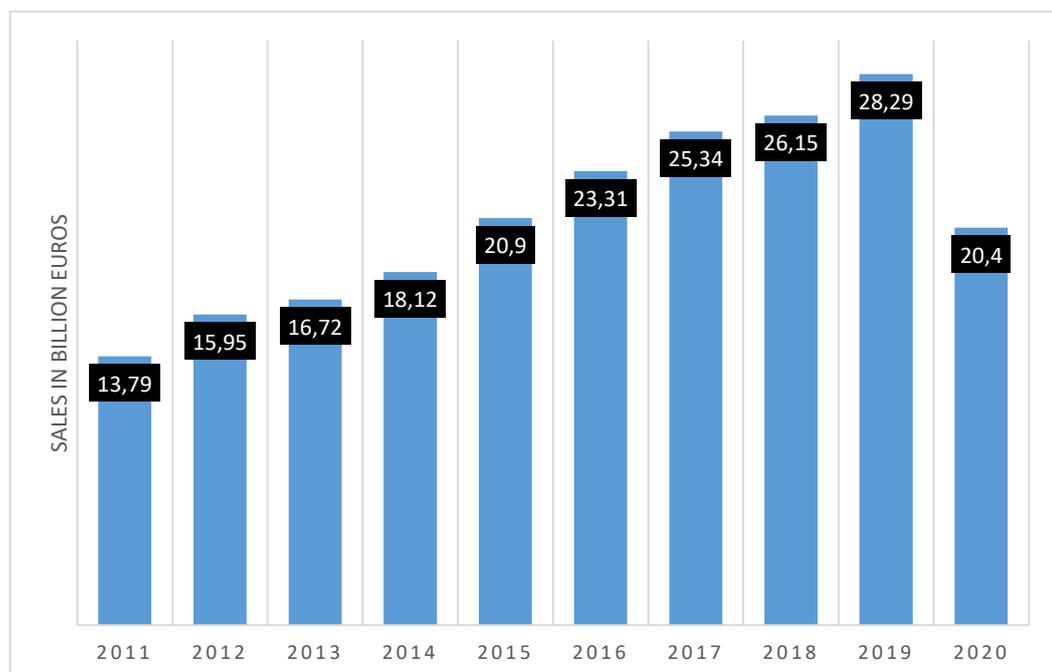
Sumber: Website BGMEA, 2018-2021.

Pada akhirnya model bisnis *fast fashion* menempatkan Inditex sebagai perusahaan fashion terkemuka. Industri fashion tidak lagi didorong oleh kreativitas

¹ *Non-Traditional Market* merupakan metode pemasaran menggunakan metode-metode yang inovatif, seperti *Guerilla Marketing*, *Seminar Marketing*, *Stunt Marketing* dan beberapa lainnya, yang bertujuan untuk menjangkau target pasar baru. Karena metode pemasaran terus berubah, taktik yang dianggap "*non-traditional*" akan terus berkembang seiring berjalannya waktu (StoryTeller Team, 2021). Dalam hal ini negara-negara yang masuk didalamnya seperti Australia, Brazil, Chile, China, Japan, India, Korea Rep., Mexico, Rusia dan beberapa negara lainnya.

dan inovasi melainkan didorong oleh keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Inilah mengapa Inditex sangat berambisi melakukan ekspansioonis pasar dengan melakukan investasi di negara-negara berkembang, karena kapital adalah roda penggerak paling fundamental yang dapat mendorong Inditex mendapatkan keuntungan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diutarakan Brooks dalam Ma'sumah dan Kusuwardhana (2020), bahwa bisnis yang menjalankan ekspasioonis adalah bisnis yang sukses. Namun, ekspasioonis yang dijalankan Inditex maupun perusahaan multinasional lain di negara-negara berkembang melahirkan pembagian kerja internasioanal, yang membagi kedalam dua kelompok yakni kelompok pemegang modal dan kelompok tenaga kerja. Keduanya saling bergantung dan negara berkembang dapat mengalami eksploitasi oleh kelompok pemegang modal (Madao, 2018: 52).

Grafik 3.1. Penjualan Fashion Inditex di Seluruh Dunia



Sumber: Statista, 2022

Jika melihat keuntungan Inditex dari penjualan periode satu dekade terakhir, penjualan fashion Inditex meningkat secara stabil selama tahun 2011 sampai 2019. Sedangkan pada tahun 2020 Inditex untuk pertama kali dalam dua dekade terakhir mengumumkan kerugian sebesar 28% akibat pandemi covid-19. Pada tahun ini Inditex hanya menghasilkan penjualan bersih sebesar 20.4 miliar euro dan memutuskan untuk menutup sebagian besar tokonya dan berfokus pada penanganan pandemi covid-19. Walaupun mengalami kerugian, Inditex pun bergerak cepat dengan meluncurkan platform penjualan online dan didalamnya menawarkan pengalaman toko dan belanja online yang terintegrasi. Penjualan online mencatat keuntungan sebesar 6.6 miliar euro dan menempatkan Inditex sebagai salah satu perusahaan mode online terkemuka dunia.

Dan pada akhirnya fashion saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dunia dan tuntutan masyarakat akan model pakaian yang baru menjadikan industri fashion terdorong untuk menjadi lebih besar dan kian kompleks. Pergantian trend fashion yang berubah setiap saat justru membuat *fast fashion* sukses diikuti oleh konsumen setia mereka. Pada dasarnya proses pembuatan suatu produk fashion bisa memakan waktu hingga 2 tahun lamanya dari menciptakan ide, pemilihan bahan, hingga pemasaran. Namun kini prosesnya hanya memakan waktu 15 hari saja. Selain itu, mereka juga memperkenalkan gaya baru secara teratur di setiap musim, koleksi busana fashion pada umumnya muncul 2-4 kali dalam setahun dan berganti sesuai musim, berbeda dengan *fast fashion* yang sanggup memunculkan koleksi busana fashion hingga 52 kali dalam setahun. Dengan keuntungan dan dampak yang besar, Inditex mampu mencatat pendapatan

sebesar USD 23,4 miliar pada tahun 2019 hingga Majalah Forbes menempatkan sang pendirinya yakni Amancio Ortega menjadi orang terkaya keenam sedunia (Roll, 2020).

Tabel 3.3. Pajak Kontribusi Inditex Tahun 2012-2020 (in millions of euros)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
TOTAL CONTRIBUTION INDITEX	4.689	6.749	6.166	5.959	5.647	4.999	4.364	4.304	4.099
Direct Taxes	1.916	3.040	2.764	2.712	2.515	2.501	2.066	2.165	1.930
Taxes Collected	2.773	3.709	3.402	3.247	3.132	2.498	2.298	2.139	2.169
TOTAL CONTRIBUTION SPAIN	1.874	1.874	1.692	1.613	1.616	1.376	1.250	1.226	1.414
Direct Taxes	1.049	1.049	928	1.010	870	1.011	770	821	760
Taxes Collected	825	825	764	603	746	365	480	405	654
TOTAL CONTRIBUTION EUROPE (EXCLUDING SPAIN)	3.416	3.416	3.184	3.043	2.781	2.578	2.268	2.225	1.927
Direct Taxes	1.037	1.037	1.002	878	844	824	732	769	664
Taxes Collected	2.379	2.379	2.182	2.165	1.937	1.754	1.536	1.456	1.263
TOTAL CONTRIBUTION AMERICA	943	943	760	753	729	600	464	513	494
Direct Taxes	623	623	489	479	481	390	336	357	328
Taxes Collected	320	320	271	274	248	210	128	156	166
TOTAL CONTRIBUTION ASIA AND REST OF THE WORLD	516	516	530	550	521	445	383	340	264
Direct Taxes	331	331	345	345	320	276	229	218	178
Taxes Collected	185	185	185	205	201	169	154	122	86

Sumber: Inditex, 2021: 157

Keuntungan yang besar ini juga membantu dalam pengembangan ekonomi dan sosial di negara-negara maju melalui penyaluran pajak. Inditex telah memberikan kontribusi besar dalam perpajakan di negara-negara maju sebagai

komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggungjawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip dasar Inditex adalah kepatuhan yang ketat terhadap kewajiban pajak di semua tempat mereka beroperasi. Pada **tabel 3.3.** tercatat sejak tahun 2012 Inditex mengeluarkan pajak kontribusi lebih dari 4 ribuan juta euro tiap tahunnya. Jumlah kontribusi pajak yang diberikan pun mengalami naik turun yang lumayan signifikan dalam kurang dari satu dekade ini. Tahun 2015 menjadi tahun dengan angka kenaikan tertinggi, yang mana mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun 2014. Namun sebaliknya, terjadi penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 31% pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda dunia. Dan dampak pandemi ini berbuntut dengan penutupan 1.200 toko yang tersebar di seluruh negara.

Inditex kemudian membagi kontribusi pajak mereka menjadi pajak langsung (*direct taxes*) yang dibayarkan, dan pajak yang dikumpulkan (*taxes collected*) atas nama pihak ketiga di setiap wilayah dan negara tempat perusahaan beroperasi. Di mana sejauh ini negara-negara yang mendapatkan hasil pajak dari Inditex adalah negara-negara kawasan Eropa (Spanyol, Portugal, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, dll), negara-negara kawasan Amerika (AS, Kanada, Brazil, Mexico), dan negara-negara kawasan Asia Pasifik (Jepang, China, Korea Selatan, Australia). Negara-negara ini pada umumnya menjadi basis aktivitas Inditex yang mana semuanya memiliki *soft infrastructure* maupun *hard infrastructure* yang memungkinkan untuk mengumpulkan keuntungan dalam jumlah besar dengan kehadiran teknologi canggih dan teknik manajemen yang canggih. *Soft infrastructure* meliputi sumber daya manusia, dan lembaga

pendukung seperti perguruan tinggi yang membantu menghasilkan karyawan terdidik. Sedangkan *hard infrastructure* yang mana terdiri dari jalan, jembatan, pelabuhan, dan gedung yang termasuk dalam pekerjaan umum. Kegunaan *hard infrastructure* lebih menjaga kepada rantai pasokan global tetap terjaga (Cheung, 2020).

Namun sebaliknya kontribusi pajak yang diberikan Inditex terhadap Bangladesh tidaklah sepadan dengan keadaannya. Justru terjadi skandal dalam laporan yang diterbitkan oleh *The Greens/European Free Alliance* yang mengungkapkan bahwa Inditex menghindari pembayaran pajak perusahaan. Hal ini terjadi pada periode tahun 2011-2014 di mana Inditex menggunakan strategi pengalihan keuntungan yang difasilitasi oleh Belanda, Irlandia, dan Swiss untuk menghindari pajak sebesar 585 juta euro. Hal ini ditunjukkan dalam rekening keuangan Inditex yang sebagian dari keuntungan mereka dipindahkan ke Belanda melalui royalti. Pembayaran royalti dilakukan oleh banyak perusahaan untuk hak menggunakan nama merek. Ini adalah trik terkenal untuk perusahaan besar yang ingin mentransfer keuntungannya kepada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (dalam hal ini Belanda) (The Greens/EFA, 2016). Dan hal ini berdampak pada Bangladesh, karena Bangladesh kehilangan 310 juta dollar per tahun sebagai akibat dari pengalihan laba perusahaan. Angka ini setara dengan seperlima dari anggaran pendidikan untuk anak di usia sekolah dasar (Reddan, 2016). Pengalihan keuntungan juga menyebabkan hilangnya pajak bagi beberapa negara maju lain, seperti 218 juta euro untuk Spanyol, 25 juta euro untuk Jerman, 57 juta euro untuk Italia, 76 juta euro untuk Prancis, 20 juta euro untuk Yunani, 22 juta poundsterling

untuk Inggris, 18 juta euro untuk Belgia dan 6 juta euro untuk Austria. Angka menunjukkan bagaimana perusahaan besar seperti Inditex dapat dan melakukan langkah sendiri untuk mengambil keuntungan dari tarif pajak terendah dan mengambil celah dari kurang harmonisasi sistem pajak di tingkat Eropa (The Greens/EFA, 2016).

Modal yang ditanamkan Inditex di Bangladesh tidak menyebabkan berpindahnya keuntungan dari negara maju ke negara berkembang. 3.5 miliar euro modal yang ditanamkan oleh Inditex selama tiga dekade sejak tahun 1980-an hanya berguna untuk menjaga perekonomian negaranya sendiri. Bangladesh terus memenuhi permintaan dari Inditex dan menyebabkan Bangladesh tidak dapat keluar dan selalu bergantung. Di mana *fast fashion* sebagai alat untuk menekan pekerja harus terus memenuhi hasil yang diminta tanpa melihat batas waktu yang diperlukan oleh pekerja sehingga pekerja banyak yang tumbang akibat tidak mendapat waktu istirahat yang cukup. Adanya Inditex juga membuat negara maju dapat menjustifikasikan tindakan eksploitasinya terhadap Bangladesh dengan memanfaatkan instrumen perusahaan multinasional dan dengan pengeksploitasian yang berkedok investasi terhadap negara berkembang (Ma'sumah & Kusuwardhana, 2020: 5).

Dalam pandangan teori ketergantungan, investasi bukanlah sebuah hadiah yang turun begitu saja melalui perantara dari negara maju ke negara berkembang. Investasi justru menjadi alat politik negara maju yang berfungsi agar negara berkembang tetap mengalami kondisi ketergantungan dan hal ini sangat mencerminkan hubungan antara negara maju dan berkembang (Rosyidin, 2020:

68). Bagi Inditex mereka mampu mengontrol penyebaran sumber daya ekonomi dan distribusi dari output yang dihasilkan. Mereka juga merahasiakan pengetahuan dan pengalaman mereka agar tidak dibuka kepada perusahaan lokal, alhasil tidak terciptanya transfer teknologi dengan baik antara Inditex dengan perusahaan RMG lokal. Perusahaan RMG lokal tidak memberikan dampak seperti apa yang diberikan oleh Inditex (Madeley, 2008: 12-13).

3.3. Kesimpulan

Liberalisasi ekonomi yang kian pesat mengubah kegiatan masyarakat yang berorientasi pada kegiatan industri. Kegiatan industri juga menciptakan hubungan timpang antara kaum bermodal dan buruh. Hal ini kemudian tercermin pada hubungan antar negara, negara maju menikmati kemajuan dan kesejahteraan ekonomi namun sebaliknya masyarakat di negara berkembang harus berjuang menghidupi diri dalam ketidakpastian. Keberadaan Inditex di Bangladesh selaku representasi dari negara maju tidak lepas dari adanya ekonomi internasional yang hegemonis dan disangga oleh prinsip liberalisasi ekonomi. Setelah Inggris berhenti melakukan kolonialisasi di Bangladesh, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan ketergantungan. Eksploitasi ekonomi muncul pasca kolonialisasi bangsa Eropa telah tiada, tetapi pengaruh terhadap perubahan kebijakan dan program yang dapat membuka jalan baru untuk mendominasi perekonomian melalui perantara lain. Bagi Inditex, investasi yang ditanamkan di Bangladesh merupakan instrumen untuk membantu Bangladesh, namun bagi Bangladesh hal ini merupakan alat eksplotasi karena mewakili ketidaksetaraan dan sifat asimetri dari

hubungan Utara-Selatan. Teori ketergantungan menganalisis bagaimana keterbelakangan di Bangladesh terjadi karena kebijakan, intervensi dan praktik perdagangan yang dijalankan negara maju secara tidak adil dan hanya menguntungkan mereka. Hubungan ekonomi antara Bangladesh maupun Inditex selaku perwakilan negara maju tidak membantu Bangladesh berkembang sama sekali. Pada akhirnya, perluasan perdagangan fashion yang dilakukan oleh Inditex bukan didorong oleh kreativitas dan inovasi melainkan secara tidak langsung didorong pencarian kapital. Selama sistem kapitalisme ada, tetap akan ada keterbelakangan pada negara dunia ketiga.